

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik identitas terkait dengan etnisitas yang dimiliki seorang kandidat adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari sebagai salah satu dampak dari pemilihan secara langsung. Buruknya, hal ini dikuatirkan akan menciptakan fragmentasi atau terkotak-kotaknya kondisi struktur sosial. Negara-negara besar dan maju seperti Amerika Serikat juga mengalami kondisi ini yang terkenal dengan sistem apartheidnya (pemisahan kulit hitam dan putih). Etnisitas yang dimiliki seseorang hanyalah suatu cara guna merujuk seperangkat tatacara, kebiasaan, adat-istiadat yang biasanya digunakan dalam kelompoknya bukan untuk politik. Namun tak dipungkiri bila rasa kedekatan emosional karena kesamaan etnis dengan kandidat yang dipilih berdampak pada tindakan politik seseorang seperti disampaikan Cohen (1996: 83): *Ethnicity is essentially a political phenomenon, as traditional custom are used only as idiom, and as mechanisms for political alignment* (etnis pada dasarnya adalah fenomena politik, karena kebiasaan tradisional hanya digunakan sebagai idiom, dan sebagai mekanisme untuk keselarasan politik).

Etnisitas merupakan salah satu alternatif dari bentuk organisasi sosial dan identifikasi kelas sosial yang sifatnya kontingen dan bukan status yang dapat diubah sebagaimana halnya dengan kelas sosial, yang bisa atau tidak bisa ditekankan dalam

konteks yang pasti atau waktu tertentu. Dalam kenyataannya seringkali komunitas etnis justru diciptakan dan diubah oleh elit politik tertentu dalam masyarakat yang modern untuk melakukan perubahan drama sosial melalui kompetisi dan konflik. Tujuannya adalah kekuasaan politik, keuntungan ekonomi, dan status sosial di antara elit politik yang bertarung. Bila hal ini dilakukan tentu saja fragmentasi sebagai salah satu dampak buruk politik identitas dapat terjadi. Tapi kalau hanya faktor kesamaan identitas (etnis dan agama) pemilih dengan kandidat sebagai suatu keputusan politik, bukanlah hal yang salah untuk dilakukan dan sah-sah saja adanya.

Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi. *Pertama*, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. *Kedua*, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya – khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan – agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di dalam kontestasi pilkades, ada dua hal yang menjadi orientasi pemilih sebagai referensi dalam menentukan pilihan. Pertama berdasarkan orientasi policy-problem solving dan kedua berdasarkan orientasi ideologi. Orientasi yang pertama, perilaku pemilih cenderung objektif karena mementingkan sejauh mana program kerja atau kepekaan sosial kontestan. Sementara orientasi yang kedua, pemilih sangat mementingkan ideologi kontestan sehingga cenderung subjektif. Perilaku pemilih kedua ini memposisikan agama, etnis, bahasa dan budaya kontestan sebagai acuan. Dari kedua pendekatan tersebut, bisa dijadikan landasan dalam melihat perilaku pemilih.

Ternyata setiap orang menghendaki agar keberadaannya selalu diakui oleh orang lain. Manakala suatu saat, oleh karena suatu hal, seseorang dianggap tidak ada dan bahkan tidak penting, maka yang bersangkutan akan tersinggung dan bahkan menjadi marah. Itulah sebabnya, mengakui seseorang, siapapun orangnya, menjadi sangat penting.

Keinginan agar diakui itu ternyata juga tidak saja diperlukan bagi seseorang, tetapi juga oleh sekelompok orang, etnis, organisasi dan bahkan juga negara. Sekelompok orang, etnis, atau bahkan sebuah bangsa, manakala keberadaannya tidak diakui, mereka akan tersinggung dan merasa terhina.

Sedemikian penting pengakuan orang lain itu, sehingga setiap orang juga berjuang agar dirinya dianggap ada dan diakui. Pada tataran pribadi, agar menjadi diakui dan bahkan dihormati, maka setiap orang berusaha untuk meraih sesuatu yang dihargai dan dianggap bernilai tinggi.

Pada kontestasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal, peran politik identitas etnis memiliki peran andil sebagai basis mencapai kekuasaan. Politik identitas etnis dalam istilah lain dipolitisasi untuk kepentingan politik, tujuannya adalah supaya setiap individu dalam menentukan pilihan di dasarkan pada pengidentifikasian kesamaan etnis, dalam kata lain program-program yang dikampanyekan oleh kontestan tidak menjadi bahan referensi utama pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah.

Peran politik identitas etnis dalam merebut kekuasaan politik pada prakteknya dinilai berhasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran etnisitas sebagai jargon dalam mempengaruhi pemilih menjadi bagian terpenting dalam kontestasi politik. Eksistensi etnis oleh sebagian politisi dimanfaatkan demi mencapai kekuasaan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dengan

masyarakatnya cenderung menekankan terbentuknya suatu persepsi yang sama. Realitas kontribusi etnis dalam politik, disadari atau tidak sudah membudaya dalam setiap ajang kontestasi demokrasi. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari peran politik identitas yang diterapkan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok masyarakat. Hal tersebut oleh sebagian pemikir seperti Fahri Hamzah dinilai sebagai cacat atau kemunduran dalam berdemokrasi.

Melihat fenomena yang terjadi demikian, ada penguatan dan pengentalan identitas sebagai basis perebutan kekuasaan politik. Politisasi identitas ini terjadi sebab identitas dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan bagi elit-elit politik. Politik identitas pada awalnya berangkat dari persamaan baik nasib, teritorial dan sebagainya, telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati publik. Dari sini dapat dilihat bahwa politik identitas mengalami transformasi pemaknaan identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang membuatnya. Segala elemen-elemen etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan menghegemoni masyarakat. Elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting dan tertinggal tetapi justru menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan khususnya kontestasi di tingkat lokal.

Dengan beragamnya identitas etnis yang ada di Numponi, terjadi persaingan antar etnis dalam momentum pilkades, dimana para calon menggunakan simbol identitas etnisnya untuk ditampilkan bahwa ia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengannya untuk membangun eksistensi dari

kelompok etnis tersebut. Dengan usaha seperti itu, para calon mengharapkan masyarakat memberikan kepercayaannya bahwa harus ada wakil dari kelompok etnis itu untuk menduduki jabatan kekuasaan.

Desa Numponi menjadi salah satu desa yang memiliki keragaman etnis, yakni etnis Dawan R , etnis Timor-timor , etnis Fehan dan etnis Tionghoa. Dari keempat etnis tersebut, Dawan R menjadi etnis yang memiliki populasi penduduk terbanyak. Eksistensi dari keempat etnis tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang sampai sekarang. Keberadaan etnis di desa Numponi, keempatnya memiliki peranan penting dalam aspek politik.

Pada kontestasi demokrasi pilkades di desa Numponi, etnis Dawan R menjadi etnis yang keterwakilannya menduduki jabatan sebagai kepala desa Numponi terbanyak sepanjang pesta demokrasi di desa tersebut. Dapat dilihat dari sebanyak dua kali masa kepemimpinan didesa Numponi yang terdiri dari Alfonsius Y. Molo S.H dan Emanuel Natalius Bouk S.I, Pust.. Hal tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini;

Tabel 1.1

Nama kepala desa dengan masa jabatannya

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Rosalinda Taolin	2008-2014

2	Alfonsius Y. Molo S.H	2017-2022
3	Emanuel Natalius Bouk S.I, Pust.	2022-sampai selesai

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Numponi Berdasarkan Etnis

No	Etnis	Populasi
1	Tionghoa	103
2	Fehan	390
3	Dawan R	1126
4	Timor-Timor	917
TOTAL		2.536

Sumber Data: Desa Numponi

Jika melihat fakta, etnis Dawan R merupakan etnis yang memiliki populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan etnis lainnya. sehingga mendominasi

dalam menduduki jabatan sebagai kepala desa Numponi, Sudah menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi lokal, bahwa etnis sebagai komoditas dalam perebutan kekuasaan. Politisasi etnis memungkinkan bahwa visi misi maupun program kerja yang dikampanyekan oleh kontestan boleh jadi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi pemilih melainkan kesamaan etnis adalah referensi utama pemilih.

Tabel 1.3

Nama Kandidat Kepala Desa, Suku Kandidat Dan Perolehan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Numponi pada Tanggal 9, bulan desember, Tahun 2022.

No	Nama	Etnis	Suara
1	Maria Herlince Mau	Fehan	106
2	Baltasar Fouk	Tionghoa	291
3	Emanuel Natalius Bouk S.I.Pust	Dawan R	462
4	David T. Ximenes	Timor-Timor	260
5	Stefanus Bouk	Dawan R	155

Sumber Data: Desa Numponi 2022

Dari data Tabel 1.3 tentang nama calon Kepala Desa, Suku Kandidat beserta perolehan suara pada pemilihan kepala desa Numponi, pada tanggal 9 Desember Tahun 2022, dimana terdapat 5 calon kandidat. Diketahui walaupun adanya

keterlibatan suku pendatang seperti Timor Leste, Fehan dan Tionghoa tetapi kelompok etnis Dawan R masih mendominasi. Hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan Emanuel Natalius Bouk S.I, Pust. dari Suku Dawan R dengan perolehan suara sebanyak 462.

Tabel 1.4

Data Hak Pilih pemilihan kepala desa dalam DPT

Data Hak Pilih				
No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa Dalam DPT	666	816	1482
2	Jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	587	664	1251
3	Jumlah hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	129	102	231

Sumber Data: Desa Numponi 2022

Ada fenomena menarik yang terjadi di Desa Numponi dimana periode sebelumnya adanya dugaan kasus korupsi oleh mantan Kepala Desa Alfonsius Y. Molo S.H, Seharusnya dari kasus tersebut elit juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat sehingga dengan mudah dapat dijatuhkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elit baru dalam masyarakat tersebut. Tetapi pada

kenyataannya periode sekarang yang memimpin adalah Kepala Desa yang merupakan etnis Dawan R, jika di lihat dari fenomena diatas selain etnis Dawan R yang memiliki populasi penduduk terbanyak di desa Numponi juga merupakan Tuan Tanah asli atau pribumi asli, sehingga ini menjadi factor mengapa elit-elit yang memimpin sampai saat ini adalah elit yang merupakan etnis Dawan R. Sehingga dapat dikatakan bahwa politik identitas ini masih menjadi basis yang mendominasi dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan, khususnya ditingkat local yaitu di desa Numponi.

Hal tersebut bisa terjadi karena adanya sumber-sumber kekuatan politik yang dimiliki kelompok sehingga menempatkannya di posisi tawar tersendiri. Salah satu keunggulan kelompok etnis yang membuatnya berbeda dari kekuatan politik lain adalah dengan adanya ikatan solidaritas yang berasal dari kesamaan identitas etnisnya. hal ini menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok/paguyuban tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih. Dapat penulis menyimpulkan bahwa tingkat sesama suku dan ras itu lebih tinggi di daerah yang memiliki identitas yang kuat.

Pemilih lebih cenderung subjektif mementingkan etnis atau golongan sebagai acuan dalam memilih seorang pemimpin tanpa melihat pada kualitas dari calon kandidat. Adanya pengaruh politik identitas dalam PilkaDes di Desa Numponi sehingga masih terdapat pemimpin yang kurang kerualitas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul; “**PERAN POLITIK IDENTITAS ETNIS DALAM MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN (STUDI KASUS PILKADES DI DESA NUMPONI KECAMATAN MALAKA TIMUR KABUPATEN MALAKA)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka peneliti hendak mengemukakan rumusan masalah yakni ;

1. Bagaimana peran politik identitas etnis untuk mempertahankan kekuasaan dalam pilkades di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka?
2. Bagaimana dampak politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran politik identitas etnis dalam mempertahankan kekuasaan dalam pilkades di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui dampak politik identitas etnis dalam pilkades di Desa numponi Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi dalam pengembangan ilmu pemerintahan Universitas Timor khususnya tentang peran politik identitas etnis dalam mempertahankan kekuasaan dalam politik local skala desa.

2. Manfaat praktis

a) Bagi peneliti

penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti dengan memanfaatkan ruang dialog bersama masyarakat membangun kesadaran dalam mewujudkan demokrasi yang kondusif, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

b) Bagi masyarakat

penelitian ini diharapkan bisa menjadi pendidikan di dalam mewujudkan kesadaran demokrasi yang aman dan tentram, tentu dalam hal ini masyarakat

harus terhindar dari doktrin praktisi politik yang menjadikan etnis sebagai basis dalam perebutan kekuasaan sehingga tidak menimbulkan konflik yang akhirnya merugikan masyarakat.